

# Desentralisasi Fiskal dan Mobilisasi Penerimaan Daerah Kabupaten/Kota: Simulasi Bagi Hasil PPh Badan dan PPN-PPnBM

✓  
↘  
Armida S. Alisjahbana

## Abstract

*Fiscal decentralization involves providing revenue adequacy on the part of regional government that includes revenue sharing of central held tax and non-tax revenues. The present revenue sharing mechanism involves individual income tax and natural resources revenues. This paper argues for the sharing of other central held taxes, the corporate income tax and value added tax as both taxes are a direct result of the region's economic performance. The distribution of both taxes are based on each region's economic performance which in itself is an incentive for the regions to enhance its economic performance. The proposed revenue sharing is also in line with the spirit of fiscal decentralization.*

*The simulation results show that income tax and value added tax revenue sharing will increase funds that are being allocated to the regions to be 37% of total domestic revenues. The results also show that kabupaten/kota revenue on average increases about 7%. Kabupaten/kota will receive their fair share of revenue increases based on their economic performance. Other important findings from the simulation results are that the horizontal fiscal imbalance does not worsen as the impact of income tax and value added tax revenue sharing has been neutralized by the DAU formula. In other words, the DAU formula is fiscally "equalizing".*

**Kata kunci:** Desentralisasi fiskal - Bagi Hasil PPh Badan usaha-Bagi Hasil PPN - Mobilisasi penerimaan daerah

**Keywords:** Fiscal decentralization - Corporate income tax revenue sharing- Value added tax revenue sharing - Local revenue mobilization

## 1. PENDAHULUAN

Dua prinsip yang mendasari desentralisasi fiskal sejalan dengan fungsi dan kewenangan daerah yang harus dijalankannya adalah otonomi dan penerimaan yang memadai (*revenue adequacy*). Pemerintah daerah pada prinsipnya harus memiliki kewenangan dan fleksibilitas dalam menentukan prioritas-prioritasnya, serta didukung oleh penerimaan daerah yang memadai.<sup>1</sup> Sumber-sumber penerimaan daerah tidak hanya yang berasal dari daerah itu sendiri, tetapi juga termasuk bagi hasil (*revenue sharing*) dan transfer yang berasal dari pusat.

Sumber-sumber penerimaan pemerintah daerah di Indonesia sejalan dengan desentralisasi fiskal yang telah berlangsung sejak awal tahun 2001 terdiri dari: PAD, Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah dan lain-lain penerimaan. Di tingkat Kabupaten/Kota yang merupakan ujung tombak pelaksanaan otonomi daerah, sumber penerimaan yang terbesar berasal dari Dana Perimbangan (86%), PAD hanya menyumbang sebagian kecil saja rata-rata sekitar 7%.<sup>2</sup> Sejalan dengan pemikiran untuk memperoleh penerimaan daerah yang memadai, daerah dimungkinkan untuk menambah PAD melalui pajak daerah dan retribusi daerah yang diatur melalui UJU 34/2000.<sup>3</sup>

Dalam konteks *revenue adequacy*, sebagian besar pengeluaran daerah selama ini masih mengacu pada pola pengeluaran yang "lama", mengikuti pola sebelum desentralisasi. Perhitungan berapa kebutuhan pengeluaran daerah yang sesungguhnya dikaitkan dengan konsep SPM (Standar Pelayanan Minimal) misalnya, saat ini masih dalam tahapan transisi. Dengan demikian, masih sulit untuk menilai secara keseluruhan apakah *revenue adequacy* ini dikaitkan dengan pengeluaran daerah sesuai dengan fungsi dan kewenangannya sudah terpenuhi atau belum. Namun, dari analisis pengeluaran daerah yang ada selama ini, peran

<sup>1</sup> Pemerintah pusat tetap memiliki kewenangan yang bersifat penentuan arah kebijakan nasional, penetapan standar, khususnya yang terkait dengan standar pelayanan jasa/barang publik.

<sup>2</sup> Usui dan Alisjahbana (2003) berdasarkan data APBD Kabupaten/Kota tahun 2001 terkonsolidasi.

<sup>3</sup> Dalam pelaksanaannya telah timbul berbagai eksekusi negatif dari upaya daerah untuk meningkatkan "PAD" dengan munculnya berbagai pajak daerah dan retribusi daerah yang bersifat "nuisance tax" dan merupakan disinsentif bagi kegiatan ekonomi di daerah.

daerah dalam menyediakan pelayanan publik dan memfasilitasi pembangunan daerah masih dirasakan sangat terbatas.

Salah satu keterbatasan yang dihadapi daerah adalah dari sisi penerimaan daerah yang dianggap tidak mencukupi. Upaya peningkatan penerimaan daerah oleh karenanya menjadi salah satu hal yang paling mendasar dalam konteks otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Selain PAD, maka peningkatan penerimaan daerah dapat dilakukan melalui peningkatan dana perimbangan yang diterima daerah. Peningkatan penerimaan yang berasal dari dana perimbangan dapat dari DAU, DAK atau dana bagian daerah (bagi hasil/*revenue sharing*). Tentu saja peningkatan dana penerimaan daerah yang berasal dari dana perimbangan ini hanya dimungkinkan, jika dalam konteks APBN dapat dipenuhi serta pengeluaran-pengeluaran yang selama ini masih dilakukan secara signifikan oleh instansi pusat juga didesentralisasikan.<sup>4</sup>

Mengacu pada permasalahan di atas, maka tulisan ini bertujuan untuk mengkaji kemungkinan peningkatan penerimaan daerah melalui desentralisasi penerimaan pusat dari pajak-pajak pusat yang belum dibagihasikan, yaitu: PPh Badan dan PPN-PPnBM<sup>5</sup>. Secara lebih spesifik tujuan makalah ini adalah: (i) mengkaji perumusan bagi hasil PPh Badan dan PPN-PPnBM dari segi desain dan implikasinya terhadap dana perimbangan; (ii) melakukan simulasi bagi hasil PPh Badan dan PPN-PPnBM terhadap penerimaan daerah Kabupaten/Kota serta implikasinya bagi kesenjangan fiskal horizontal dan vertikal; dan (iii) membahas berbagai isu khusus dan implikasi kebijakan yang terkait dengan bagi hasil PPh Badan dan PPN-PPnBM.

---

<sup>4</sup> Isu ini terkait dengan masalah alokasi pengeluaran pemerintah antara pusat dengan daerah, termasuk masalah desentralisasi pengeluaran

<sup>5</sup> Untuk penyederhaan masalah, dalam tulisan ini bagi hasil PPN masih disatukan dengan PPnBM karena keterbatasan akses data yang dimiliki penulis. Perumusan yang lebih tepat adalah jika yang diperhitungkan hanya komponen PPN saja.

## 2. BAGI HASIL PPh BADAN, PPN-PPnBM DAN ALOKASI DANA PERIMBANGAN

### 2.1. Mekanisme dan Disain Bagi Hasil PPh Badan, PPN-PPnBM

Dasar pemikiran bagi hasil PPh Badan dan PPN-PPnBM adalah mengikuti konsep *revenue sharing* atas pajak-pajak yang dipungut oleh pusat, yang sebagiannya dikembalikan ke daerah.<sup>6</sup> Dari semua jenis pajak pusat, konsep *revenue sharing* sudah dilakukan untuk PPh Individu, PBB dan BPHTB. Jumlah hasil PPh Badan dan PPN-PPnBM yang dibagi hasilkan ke daerah diasumsikan sama dengan yang dilakukan untuk PPh Individu, yaitu sebesar 20%. Pembagiannya adalah 8% dibagikan ke propinsi dan 12% untuk daerah Kabupaten/Kota.

Selanjutnya, dari dana bagi hasil PPh Badan maupun PPN dan PPn-BM kemudian dibagikan diantara daerah Kabupaten/Kota yang ada di seluruh Indonesia. Ada beberapa alternatif cara membagikannya:

1. Menurut jumlah kontribusi dalam penyeteran PPh Badan maupun PPN tersebut per daerah.
2. Menurut distribusi relatif (peran) kontribusi aktivitas perekonomian antar daerah Kabupaten/Kota. Indikator yang dapat digunakan adalah PDRB, atau khusus untuk bagi hasil PPN dapat digunakan indikator nilai tambah sektor-sektor PDRB yang memberi kontribusi terhadap nilai PPN. Misalnya: menggunakan indikator nilai tambah sektor-sektor PDRB di luar sektor pertanian, karena hasil pertanian tidak terkena PPN.

Alternatif ke 1 dikenal dengan alokasi bagi hasil pajak pusat ke daerah dengan menganut azas domisili. Kelemahan dari pendekatan ini adalah daerah yang menyetor pajak pusat tersebut belum tentu adalah daerah yang juga menghasilkan aktivitas ekonomi yang terkait dengan pajak yang disetor tersebut. Sebagai contoh adalah banyaknya perusahaan-perusahaan dengan domisili kantor pusat di Jakarta, sehingga penyeteran pajak dilakukan melalui Kantor Pajak Wilayah

<sup>6</sup> Alternatif lain dari konsep bagi hasil (*revenue sharing*) adalah *tax base sharing* yang tidak dibahas dalam tulisan ini.

Jakarta. Sementara itu, lokasi kegiatan perusahaan seringkali berada di daerah.

Alternatif ke 2 dianggap akan lebih dapat memberikan "rasa keadilan" dan insentif bagi daerah-daerah dikaitkan dengan kinerja perekonomiannya. Alternatif ini juga diharapkan dapat mengurangi permasalahan kesenjangan yang terjadi, jika bagi hasil dilakukan berdasarkan sistem administrasi (pengumpulan) perpajakan yang berlaku saat ini (alternatif 1 di atas). Atas dasar pertimbangan tersebut, maka simulasi bagi hasil PPh Badan dan PPN-PPnBM yang dilakukan dalam tulisan ini menggunakan indikator PDRB Kabupaten/Kota i dibagi dengan total PDRB Kabupaten/Kota sebagai faktor pengali terhadap nilai PPh Badan dan PPN-PPnBM yang dibagikan ke masing-masing daerah Kabupaten/Kota.

## 2.2. Alokasi APBN untuk Dana Perimbangan

Usulan bagi dimasukkannya PPh Badan dan PPN-PPnBM ke dalam "pool" dana yang akan dibagikan ke daerah akan mengubah sisi bagian daerah/bagi hasil serta alokasi DAU ke masing-masing daerah.<sup>7</sup> Bagi hasil PPh Badan dan PPN-PPnBM menghasilkan tambahan dana sebesar Rp 19,4 triliun ke dalam alokasi bagian daerah, sehingga penerimaan dalam negeri netto menjadi Rp 254,826 triliun. Plafon DAU sebesar 25% dari penerimaan dalam negeri netto berarti DAU tahun 2002 adalah Rp 68,557 triliun sebelum bagi hasil PPh Badan dan PPN-PPnBM. Dana Perimbangan secara keseluruhan meringkat 15% setelah ada penambahan bagi hasil pajak tersebut.

Masalah yang tidak sederhana muncul, ketika akan menghitung berapa "pool" bagi hasil PPh Badan dan PPN-PPnBM untuk daerah kabupaten/kota. DKI Jakarta merupakan daerah yang diperlakukan secara khusus, karena DKI Jakarta secara implisit juga mencakup daerah kota di dalamnya. Dengan demikian, maka *share* DKI Jakarta adalah "utuh" sebesar 20%. Karena makalah ini mengkonsentrasikan hasil perhitungan dan simulasi hanya pada daerah kabupaten/kota, maka *share* bagi hasil PPh Badan dan PPN-PPnBM untuk DKI Jakarta (daerah

<sup>7</sup> Dalam hal jumlah dana "pool" DAU maupun formulasi DAU, lihat pembahasan di sub-bagian 2.3. tulisan ini.

kotanya) dikeluarkan terlebih dahulu dari "pool" dana yang untuk kabupaten/kota. "Pool" dana tersebut kemudian dibagikan ke seluruh kabupaten/kota di Indonesia, kecuali daerah DKI Jakarta.

Secara singkat, dapat dilihat bahwa bagian daerah dari PPh Badan dan PPN-PPnBM memberikan kontribusi kenaikan dana perimbangan yang nilainya sama besar dengan bagi hasil PPh Individu, PBB, dan BPHTB. Total dana perimbangan setelah bagi hasil PPh Badan dan PPN-PPn BM untuk daerah Kabupaten/Kota meningkat sebesar 7% dari sebelumnya (lihat Tabel 2).

**Tabel 1**  
*Alokasi APBN untuk Dana Perimbangan Tahun 2002*  
*Baseline dan Simulasi Rp Triliun*

	Baseline	Simulasi
Penerimaan Dalam Negeri	299,800	299,800
Bagian Daerah/Bagi Hasil:	24,972	44,374
PPh Individu (Psl 21)	4,072	4,072
PBB	6,200	6,200
BPHTB	1,700	1,700
SDA	13,000	13,000
PPh Badan (Psl 25/29)	-	6,231
PPN - PPnBM	-	13,171
Dana Reboisasi (DAK)	0,600	0,600
Penerimaan Dalam Negeri Netto	274,228	254,826
Dana Alokasi Umum	68,557	63,707
Dana Perimbangan	94,129	108,680

Sumber: Nota Keuangan dan UU RI 29/2002, Tentang APBN 2003, diolah

Tabel 2  
**DAU, Bagian Daerah dan Dana Perimbangan Daerah Kabupaten/Kota**  
**Tahun 2002 – Baseline dan Simulasi**  
**Rp Triliun**

	<i>Baseline</i>	Simulasi
Dana Alokasi Umum	61,701	57,336
Bagian Daerah/Bagi Hasil:	10,653	20,402
Bagi Hasil PPh Individu, PBB dan BPHTB	3,669	3,669
SDA	6,984	6,984
PPh Badan (Ps1 25/29)	0	3,130
PPN - PPnBM	0	6,617
<b>Dana Perimbangan</b>	<b>72,354</b>	<b>77,738</b>

Sumber: Nota Keuangan dan UU RI 29/2002, Tentang APBN 2003, diolah

### 2.3. Perubahan Pada Formulasi DAU

Usulan bagi penambahan komponen bagi hasil PPh Badan dan PPN-PPnBM kepada daerah akan berimplikasi pada perubahan formulasi DAU, sehingga untuk keperluan simulasi akan dibedakan antara DAU1i (*baseline*) dengan DAU2i (simulasi). Perumusan DAU yang digunakan adalah perumusan dasar DAU tahun anggaran 2002, yang terdiri dari komponen Alokasi Minimum (*lump sum* dan komponen proporsi belanja pegawai) dan komponen formula.<sup>5</sup> Rumus ini kemudian akan disebut sebagai DAU1i *baseline*, sedangkan rumus DAU yang telah memperhitungkan bagi hasil PPh Badan dan PPN-PPn BM akan disebut sebagai DAU2i simulasi.

Formulasi DAU:

$$\text{Baseline : DAU1i} = [ \text{LS1i} + (\alpha \text{ Gaji})_{1i} ] + ( \text{BD1i} \times \text{DAU1n} )$$

$$\text{Simulasi : DAU2i} = [ \text{LS2i} + (\alpha \text{ Gaji})_{2i} ] + ( \text{BD2i} \times \text{DAU2n} )$$

<sup>5</sup> Lihat Sidik, et.al. (2002), dimana dalam tulisan ini tidak dilakukan ketentuan "*hold harmless provision*" dan penyesuaian terhadap jumlah DAU hasil perhitungan maupun penambahan dana penyeimbang. Hal ini dilakukan untuk menyederhanakan perhitungan dan mempertajam analisis hasil perhitungan antara model DAU tanpa memperhitungkan bagi hasil PPh Badan dan PPN-PPnBM dengan model yang memperhitungkannya.

dimana

DAU<sub>i</sub> = DAU yang dialokasikan ke Kabupaten/Kota *i*

DAUn = Total DAU yang dialokasikan ke seluruh Kabupaten/Kota

BD<sub>i</sub> = Bobot daerah Kabupaten/Kota *i*

LS<sub>i</sub> = Lumpsum (10% DAUn) untuk setiap Kabupaten/Kota *i*

( $\alpha$  Gaji)<sub>i</sub> = Alokasi proporsional menurut kebutuhan belanja pegawai  
(50% DAUn) untuk daerah Kabupaten/Kota *i*

1 = *Baseline*

2 = *Simulasi*

Perbedaan utama antara perhitungan DAU *baseline* dengan DAU simulasi terletak pada (lihat Tabel 3):

1. Jumlah total DAU yang dialokasikan untuk daerah Kabupaten/Kota
2. Komponen *lump sum* yang diterima masing-masing daerah Kabupaten/Kota
3. Alokasi komponen DAU yang berdasarkan proporsi belanja pegawai masing-masing daerah Kabupaten/Kota
4. Kapasitas Fiskal daerah ( $KpF1i < KpF2i$ )



**Tabel 3**  
**Komponen Perhitungan DAU**  
**Tahun 2002 - Baseline dan Simulasi**

	Baseline (1)	Simulasi (2)
DAUn	Rp 61,701 triliun	Rp 57,336 triliun
LSi	Rp 18,4 milyar	Rp 17,1 milyar
( $\alpha$ Gaji) <sub>i</sub>	$(B_{Pi} / \sum B_{Pi}) \cdot Rp\ 30,535\ \text{triliun}$  dimana: B <sub>Pi</sub> = Belanja pegawai daerah Kabupaten/Kota i	$(B_{Pi} / \sum B_{Pi}) \cdot Rp\ 28,668\ \text{triliun}$
B <sub>Di</sub>	$(K_{bFi} - K_{pF1i}) / \sum (K_{bFi} - K_{pF1i})$  dimana: K <sub>pF1i</sub> = PADI estim + P <sub>BBi</sub> + B <sub>PHTBi</sub> + P <sub>Ph Indv i</sub> + 0,75 SDAi  K <sub>bFi</sub> = lihat Sidik, et.al., 2002	$(K_{bFi} - K_{pF2i}) / \sum (K_{bFi} - K_{pF2i})$  dimana: K <sub>pF2i</sub> = K <sub>pF1i</sub> + P <sub>Ph Badan i</sub> + P <sub>PN-PPnB<sub>Mi</sub></sub>

### 3. HASIL SIMULASI

#### 3.1. Implikasi Terhadap Mobilisasi Penerimaan Daerah Kabupaten/Kota

Evaluasi terhadap dampak bagi hasil PPH Badan dan PPN-PPnBM dapat dilihat melalui seberapa besar penerimaan daerah meningkat dibandingkan dengan sebelumnya. Secara rata-rata penerimaan daerah Kabupaten/Kota meningkat sebesar 7%, namun jika dilihat distribusi peningkatannya diantara daerah Kota dengan Kabupaten ternyata tidak merata. Sebagai konsekuensi dari distribusi bagi hasil ini yang menggunakan PDRB sebagai kriteria alokasi, maka daerah kota yang umumnya ditandai dengan PDRB yang relatif tinggi dibandingkan dengan daerah Kabupaten, mengalami peningkatan penerimaan daerah yang cukup signifikan (11% dibandingkan sebelumnya).

Demikian pula dengan penerimaan daerah kabupaten penghasil Migas yang meningkat sebesar 8%, sementara daerah kabupaten non-penghasil migas harus cukup puas dengan penerimaan daerah mereka yang meningkat rata-rata 6%. Variasi yang sama dapat dilihat untuk

peningkatan penerimaan daerah di Kalimantan dan Jawa yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya. Dominasi perekonomian daerah-daerah di Jawa dan Bali pada sektor industri dan jasa, serta peran sektor migas di Kalimantan dapat menjelaskan variasi yang tinggi untuk ketiga daerah tersebut.

**Tabel 4**  
*Penerimaan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2002*  
*Baseline dan Simulasi (Rp Triliun)*

Daerah	Penerimaan Daerah		Perubahan
	Baseline: PAD+DAU+ BHP+SDA	Simulasi: PAD+DAU+BHP+SDA+ PPh Badan+PPN-PPnBM	
Kabupaten/Kota	75,992	81,376	7,1%
Kota	12,779	14,239	11,4%
Kabupaten	63,213	67,137	6,2%
Kabupaten – Migas	12,682	13,696	8,0%
Kabupaten – Non-Migas	50,532	53,441	5,8%

Sumber: Hasil perhitungan

**Tabel 5**  
*Penerimaan Daerah Kabupaten/Kota*  
*Sumatera, Jawa dan Bali, Kalimantan, Sulawesi dan Lainnya*  
*Tahun 2002 – Baseline dan Simulasi*  
*Rp Triliun*

Daerah Kabupaten/Kota	Penerimaan Daerah		Perubahan
	Baseline: PAD+DAU+ BHP+SDA	Simulasi: PAD+DAU+BHP+SDA+ PPh Badan+PPN-PPnBM	
Indonesia	75,993	81,376	7,1%
Sumatera	19,878	20,959	5,4%
Jawa dan Bali	29,682	31,985	7,8%
Kalimantan	8,355	9,287	11,2%
Sulawesi	7,215	7,532	4,4%
Lainnya	10,861	11,613	6,9%

Sumber: Hasil perhitungan

### 3.2. Implikasi Terhadap Kesenjangan Fiskal Vertikal dan Horizontal

Salah satu indikator yang seringkali digunakan untuk melihat kesenjangan fiskal vertikal adalah berapa besar *share* dari total penerimaan pemerintah yang menjadi kewenangan sepenuhnya pemerintah daerah dibandingkan dengan yang menjadi kewenangan pusat. Proksi yang dapat digunakan adalah dengan membandingkan berapa *share* dari total penerimaan dalam negeri yang dialokasikan untuk anggaran daerah dengan kewenangan pada daerah.<sup>9</sup> Hasil simulasi menunjukkan adanya peningkatan anggaran untuk pemerintah daerah yang dialokasikan dari APBN, yang dengan sendirinya berarti mengurangi kesenjangan fiskal vertikal (Tabel 6).

**Tabel 6**  
*Anggaran Daerah dan Penerimaan Dalam Negeri*  
*Tahun 2002 – Baseline dan Simulasi*  
*Rp Triliun*

	Baseline	Simulasi
Penerimaan Dalam Negeri	299,800	299,800
Dana Perimbangan	94,129	108,680
Dana Otonomi Khusus dan Penyeimbang	3,700	3,700
Anggaran untuk Daerah	97,829	112,380
% Thd Penerimaan Dalam Negeri	33%	37%

Sumber: Hasil perhitungan

Dampak pemberian bagi hasil PPh Badan dan PPN-PPnBM terhadap kesenjangan fiskal horizontal dapat dilihat dari variasi penerimaan per kapita antar daerah menurut sumber penerimaan seperti yang digambarkan dalam Tabel 7 dan Tabel 8. Tiga indikator yang digunakan mengukur variasi pendapatan per kapita menurut sumbernya

<sup>9</sup> Kecuali dalam hal ini DAK, namun DAK dalam tahun anggaran 2002 berjumlah sangat tidak signifikan.

adalah: koefisien variasi, standar deviasi dari logaritma dan koefisien Gini. Secara umum dari Tabel 7 dan 8, ketiga indikator tersebut memberikan hasil (arah) yang konsisten (tidak saling bertentangan).

Tabel 7 memperlihatkan variasi pendapatan daerah per kapita yang menunjukkan peningkatan jika PAD ditambah dengan bagi hasil pajak (PPh Individu, PBB dan BPHTB), dan menjadi sangat tidak merata setelah ditambah dengan komponen bagi hasil SDA. Bagi hasil PPh Individu dilakukan berdasarkan daerah asal pengumpul kontribusi PPh tersebut, yang dalam hal ini terkait dengan sistem administrasi pengumpulan pajak penghasilan yang berlaku.<sup>10</sup> Nilai PBB dan BPHTB akan sangat tergantung pada harga tanah yang berlaku di daerah tersebut, sedangkan sumber daya alam terkonsentrasi pada daerah-daerah tertentu yang memiliki kekayaan sumber daya alam. Kesenjangan ini kemudian dapat diperkecil secara signifikan oleh komponen DAU1, atau dengan perkataan lain DAU1 bersifat "equalizing".

Hal yang hampir sama dapat dilihat pada Tabel 8, yang memperlihatkan variasi penerimaan pemerintah daerah kabupaten/kota per kapita yang telah memperhitungkan bagi hasil PPh Badan dan PPN-PPnBM. Bagi hasil PPh Badan dan PPN-PPnBM tidak mengubah variasi penerimaan antar daerah yang dalam kondisi sangat tidak merata setelah daerah menerima bagi hasil SDA. Namun, karena formulasi DAU2 kemudian memperhitungkan semuanya ke dalam komponen kapasitas fiskal, maka alokasi DAU2 pada akhirnya dapat membuat variasi penerimaan antar daerah menjadi kecil secara signifikan. Bahkan, hasil yang diperlihatkan oleh DAU2 hampir sama dengan hasil DAU1 sebelumnya. Jadi, dampak kesenjangan fiskal horizontal dari bagi hasil SDA maupun pajak, termasuk PPh Badan dan PPN-PPnBM telah berhasil diminimalisasikan oleh formulasi DAU.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Berdasarkan cara bagi hasil PPh Individu seperti ini, maka PPh Individu terkonsentrasi di daerah DKI Jakarta dan sekitarnya.

<sup>11</sup> Meskipun cara ini tidak sepenuhnya menjamin pemerataan fiskal antar daerah, karena belum memperhitungkan kebutuhan pengeluaran pemerintah daerah (Lewis, 2001).

**Tabel 7**  
**Variasi Penerimaan Pemerintah Daerah Per Kapita**  
**Menurut Sumber Penerimaan**  
**Tahun 2002 – Baseline**

Sumber Penerimaan Daerah Kabupaten/Kota	Coefficient of Variation	Standard Deviation of Log	Gini Coefficient
PAD	0,728	0,600	0,352
+ BHP	0,911	0,690	0,409
+ SDA	2,387	1,086	0,694
+ DAU1	0,882	0,625	0,374

Sumber: Hasil perhitungan

**Tabel 8**  
**Variasi Penerimaan Pemerintah Daerah Per Kapita**  
**Menurut Sumber Penerimaan**  
**Tahun 2002 – Simulasi**

Sumber Penerimaan Daerah Kabupaten/Kota	Coefficient of Variation	Standard Deviation of Log	Gini Coefficient
PAD	0,728	0,600	0,352
+ BHP	0,911	0,690	0,409
+ SDA	2,387	1,086	0,694
+ PPh Badan	2,205	1,006	0,656
+ PPN/PPnBM	1,986	0,914	0,606
+ DAU2	0,892	0,623	0,376

Sumber: Hasil perhitungan

#### 4. PENUTUP

PPh Badan dan PPN-PPnBM merupakan cermin dari kinerja perekonomian daerah, sehingga merupakan sumber penerimaan yang relevan untuk dibagihasilkan ke daerah. Perumusan bagi hasil PPh Badan dan PPN-PPnBM merupakan satu kesatuan implementasi desentralisasi fiskal dalam "pool" dana perimbangan. Jika bagi hasil tersebut dilakukan berdasarkan kontribusi daerah menurut kinerja

perekonomian daerah, maka bagi hasil ini akan merupakan insentif tersendiri bagi daerah untuk meningkatkan kinerja perekonomiannya.

Hasil simulasi menunjukkan bahwa bagi hasil PPh Badan dan PPN-PPnBM akan meningkatkan penerimaan dalam negeri (pusat) yang didaerahkan menjadi 37%, demikian juga dengan penerimaan daerah kabupaten/kota akan meningkat rata-rata sebesar 7%. Daerah akan menerima sesuai dengan kinerja dan kontribusi perekonomiannya terhadap perekonomian secara nasional. Hasil simulasi juga menunjukkan bahwa bagi hasil ini tidak akan memperburuk kesenjangan fiskal horizontal, karena DAU telah memperhitungkan dalam formulasinya.

Kelebihan lain dari usulan bagi hasil PPh Badan dan PPN-PPnBM ini, hasilnya akan masuk ke dalam APBD daerah, sehingga daerah memiliki kewenangan dan fleksibilitas dalam penggunaannya sesuai dengan prioritas daerah. Jika usulan ini akan diberlakukan, maka masih banyak detail teknis yang masih perlu disiapkan. Diantaranya, bagaimana mekanisme alokasi yang benar-benar sesuai dengan kontribusi dan kinerja perekonomian daerah, sehingga alokasinya akan merupakan insentif tersendiri bagi daerah untuk memacu kinerja perekonomiannya.<sup>12</sup>

## 5. DAFTAR PUSTAKA

- Lewis, Blane, (2001). *The New Indonesian Equalization Transfer*, *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, Vol 37 No 3, December.
- Machfud Sidik, B. Raksaka Mahi, Robert Simanjuntak, Bambang Brodjonegoro, (2002). *Dana Alokasi Umum: Konsep, Hambatan, dan Prospek di Era Otonomi Daerah*, LPEM-FEUI, MPKP-FEUI Bekerjasama dengan Ditjen PKPD Departemen Keuangan dan Kompas.

---

<sup>12</sup> Dalam hal ini pertanyaannya: apakah penggunaan PDRB sudah merupakan kriteria yang tepat dalam mengalokasikan bagi hasil PPh Badan dan PPN-PPnBM tersebut. Hal teknis lainnya yang juga perlu diubah adalah revisi UU Pajak Penghasilan dan UU PPN, sehingga memungkinkan dilakukannya bagi hasil kedua jenis pajak pusat tersebut.

- Republik Indonesia, (1999-a). Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
- \_\_\_\_\_, (1999-b). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- \_\_\_\_\_, (2000-a). Peraturan Pemerintah No. 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan.
- \_\_\_\_\_, (2000-b). Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 181 Tahun 2000 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2001.
- \_\_\_\_\_, (2002). Nota Keuangan dan UU RI No. 29 Tahun 2002 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2003.
- Shah, Anwar, Zia Qureshi and Brian Binder, (1994). *Intergovernmental Fiscal Relations in Indonesia: Issues and Options*, World Bank Discussion Paper No. 239, The World Bank, Washington, DC.
- Silver, Christopher, Iwan J. Azis dan Larry Schroeder, (2001). *Intergovernmental Transfers and Decentralization in Indonesia*, *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, Vol 37 No 3, December.
- Usui, Norio dan Armida S. Alisjahbana, (2003). *Local Development Planning And Budgeting In Decentralized Indonesia: Key Issues*, Paper presented at the International Symposium on "Indonesia's Decentralization Policy: Problems and Policy Directions", Tokyo, January.

## Lampiran

Hasil Simulasi Bagi Hasil PPh Badan dan PPN-PPnBM Terhadap DAU, dan Total Penerimaan Daerah (PAD+Dana Perimbangan): *Baseline* dan Simulasi Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2002

No.	Kab/Kota	Baseline					Simulasi							% Kenaikan
		PAD	DAU1	BHP	SDA	Total1	PAD	DAU2	BHP	SDA	PPH Badan	PPN-PPnBM	Total2	
101	Kab. Aceh Barat	4.9	160.9	4.4	30.9	201.2	4.9	155.3	4.4	30.9	3.9	8.2	207.7	3.2%
102	Kab. Aceh Besar	4.6	147.3	2.9	27.9	182.8	4.6	138.5	2.9	27.9	4.3	9.0	187.3	2.5%
103	Kab. Aceh Selatan	3.9	137.5	2.1	28.7	172.2	3.9	131.7	2.1	28.7	3.6	7.7	177.8	3.2%
104	Kab. Aceh Singkil	3.0	105.5	2.6	28.3	139.4	3.0	104.9	2.6	28.3	1.0	2.2	142.1	1.9%
105	Kab. Aceh Tengah	3.9	127.5	2.8	28.1	162.2	3.9	121.0	2.8	28.1	3.8	8.0	167.4	3.2%
106	Kab. Aceh Tenggara	3.2	129.4	3.2	28.1	163.8	3.2	128.7	3.2	28.1	1.9	4.1	169.2	3.3%
107	Kab. Aceh Timur	7.8	194.1	14.6	40.6	257.1	7.8	174.0	14.6	40.6	10.6	22.4	270.1	5.1%
108	Kab. Aceh Utara	9.6	148.0	37.5	311.3	506.4	9.6	137.5	37.5	311.3	47.0	99.3	642.1	26.8%
109	Kab. Bireuen	6.4	132.9	4.8	28.0	172.2	6.4	93.8	4.8	28.0	20.4	43.2	196.7	14.2%
110	Kab. Pidie	4.8	179.7	3.3	28.3	216.1	4.8	168.6	3.3	28.3	5.6	11.9	222.4	2.9%
111	Kab. Simeuleu	2.6	63.9	2.6	28.3	97.4	2.6	64.4	2.6	28.3	1.0	2.0	101.0	3.7%
112	Kota Banda Aceh	7.5	118.9	4.6	27.9	159.0	7.5	111.5	4.6	27.9	3.0	6.3	160.8	1.1%
113	Kota Sabang	2.7	68.9	2.6	27.9	102.1	2.7	70.9	2.6	27.9	0.4	0.8	105.3	3.1%
201	Kab. Asahan	15.0	240.8	20.6	1.5	278.0	15.0	195.8	20.6	1.5	24.1	51.0	308.0	10.8%
202	Kab. Dairi	5.3	143.2	3.8	2.1	154.4	5.3	136.4	3.8	2.1	5.1	10.8	163.5	5.9%
203	Kab. Deli Serdang	16.9	411.9	28.2	2.2	459.2	16.9	368.3	28.2	2.2	23.7	50.1	489.4	6.6%

Bersambung...



## Desentralisasi Fiskal dan Mobilisasi Penerimaan Daerah Kabupaten/Kota:

Lanjutan...

204	Kab. Tanah Karo	6,9	159,0	3,9	1-5	171,3	6,9	147,4	3,9	1-5	6,2	13,1	179,0	4,5%
205	Kab. Labuhan Batu	13,3	234,1	17,4	3,2	268,0	13,3	190,0	17,4	3,2	24,0	50,8	298,7	11,4%
206	Kab. Langkat	10,3	250,8	20,4	9,9	291,3	10,3	219,0	20,4	9,9	16,8	35,6	311,9	7,1%
207	Kab. Mandailing Natal	5,9	140,7	4,0	3,6	154,2	5,9	136,4	4,0	3,6	4,5	9,6	164,0	6,4%
208	Kab. Nias	9,7	211,7	5,7	2,9	230,0	9,7	201,5	5,7	2,9	7,9	16,7	244,4	6,2%
209	Kab. Simalungun	8,1	271,0	21,1	1,5	301,7	8,1	242,2	21,1	1,5	14,4	30,5	317,9	5,4%
210	Kab. Tapsel	12,3	319,2	10,8	3,5	345,7	12,3	291,1	10,8	3,5	13,0	27,5	358,2	3,6%
211	Kab. Tapeng	4,8	128,8	4,7	2,2	140,5	4,8	125,1	4,7	2,2	3,5	7,5	147,8	5,2%
212	Kab. Taput	6,5	216,2	4,3	1,9	238,9	6,5	206,0	4,3	1,9	5,3	11,2	235,2	2,7%
213	Kab. Toba Samosir	5,6	148,3	3,1	1,5	158,6	5,6	142,3	3,1	1,5	4,6	9,7	166,8	5,2%
214	Kota Binjai	6,0	134,0	5,2	1,5	146,8	6,0	129,9	5,2	1,5	2,8	5,9	151,3	3,1%
215	Kota Medan	74,6	365,5	65,4	1,5	507,0	74,6	276,0	65,4	1,5	42,2	89,2	549,0	8,3%
216	Kota P. Siantar	8,9	137,6	4,7	1,5	152,8	8,9	127,4	4,7	1,5	6,0	12,7	161,4	5,6%
217	Kota Sibolga	4,1	100,6	2,8	1,5	109,1	4,1	101,1	2,8	1,5	1,6	3,5	114,6	5,1%
218	Kota T. Balai	5,1	109,5	3,4	1,5	119,6	5,1	106,0	3,4	1,5	2,7	5,7	124,5	4,1%
219	Kota T. Tinggi	6,1	119,9	3,2	1,5	130,7	6,1	115,7	3,2	1,5	2,7	5,7	135,0	3,3%
301	Kab. 50 Kota	9,2	148,3	4,1	1,0	162,6	9,2	138,6	4,1	1,0	5,9	12,6	171,5	5,4%
302	Kab. Agam	9,5	177,6	4,1	1,0	192,1	9,5	165,4	4,1	1,0	6,5	13,7	200,2	4,2%
303	Kab. Kep. Mentawai	3,5	109,0	2,7	2,4	117,6	3,5	110,2	2,7	2,4	1,9	3,9	124,5	5,0%
304	Kab. P. Pariaman	9,8	189,2	2,6	2,0	203,9	9,8	177,4	2,6	2,0	6,0	12,8	210,9	3,4%
305	Kab. Pasaman	8,3	181,0	7,6	1,1	198,0	8,3	174,4	7,6	1,1	5,6	11,9	209,0	5,5%
306	Kab. Pes. Selatan	8,1	168,5	3,7	1,2	181,5	8,1	161,3	3,7	1,2	4,8	10,1	189,1	4,2%
307	Kab. S.Lunto Sij.	7,7	149,7	4,6	3,5	165,5	7,7	142,0	4,6	3,5	5,3	11,2	174,3	5,3%
308	Kab. Solok	8,2	174,4	5,2	1,1	188,9	8,2	165,5	5,2	1,1	5,9	12,5	198,4	5,0%
309	Kab. Tanah Datar	7,9	153,7	3,4	1,0	166,1	7,9	143,8	3,4	1,0	5,6	11,8	173,4	4,4%
310	Kota B. Tinggi	6,4	99,1	2,9	1,0	109,5	6,4	96,4	2,9	1,0	2,1	4,5	113,4	3,6%

Bersambung...

## Lanjutan...

311	Kota P. Panjang	3,8	75,1	2,2	1,0	82,2	3,8	76,2	2,2	1,0	0,9	1,9	86,0	4,7%
312	Kota Padang	47,6	244,3	13,5	1,0	306,3	47,6	188,5	13,5	1,0	25,5	53,8	329,8	7,7%
313	Kota Payakumbuh	5,7	115,4	2,4	1,0	124,6	5,7	112,4	2,4	1,0	1,8	3,9	127,3	2,2%
314	Kota Sawahlunto	4,1	77,4	3,0	2,3	86,8	4,1	76,4	3,0	2,3	1,9	4,0	91,6	5,6%
315	Kota Solok	4,2	79,8	2,1	1,0	87,1	4,2	80,3	2,1	1,0	1,1	2,4	91,1	4,5%
401	Kab. Bengkalis	8,6	90,8	47,5	530,0	676,8	8,6	84,4	47,5	530,0	10,3	21,8	702,5	3,8%
402	Kab. Indragiri Hilir	9,5	130,4	13,8	90,8	244,5	9,5	114,3	13,8	90,8	8,0	16,9	253,3	3,6%
403	Kab. Indragiri Hulu	4,3	83,1	11,4	92,2	190,9	4,3	73,0	11,4	92,2	4,1	8,8	193,8	1,5%
404	Kab. Kampar	5,0	109,4	22,8	204,1	341,2	5,0	101,6	22,8	204,1	2,9	6,1	342,5	0,4%
405	Kab. Karimun	4,5	41,7	7,7	99,9	153,8	4,5	37,3	7,7	99,9	1,2	2,6	153,1	-0,4%
406	Kab. Riau, Kep	8,3	97,8	18,3	91,0	215,5	8,3	87,3	18,3	91,0	3,6	7,7	216,3	0,4%
407	Kab. Kuantan Singingi	4,6	79,4	8,8	88,9	181,8	4,6	73,4	8,8	88,9	2,1	4,4	182,2	0,2%
408	Kab. Natuna	5,6	40,1	9,1	87,7	142,5	5,6	34,0	9,1	87,7	2,4	5,1	143,9	1,0%
409	Kab. Pelalawan	3,8	61,1	19,8	91,2	175,9	3,8	53,3	19,8	91,2	3,6	7,6	179,4	2,0%
410	Kab. Rokan Hilir	6,0	46,4	31,4	365,8	449,7	6,0	43,1	31,4	365,8	6,5	13,6	466,5	3,7%
411	Kab. Rokan Hulu	3,9	59,2	17,8	94,3	175,2	3,9	53,3	17,8	94,3	2,5	5,3	177,2	1,1%
412	Kab. Siak	6,1	87,6	22,0	352,7	468,4	6,1	81,4	22,0	352,7	3,9	8,2	474,3	1,2%
413	Kota Batam	15,2	56,0	34,6	87,7	193,4	15,2	39,1	34,6	87,7	23,3	49,2	248,9	28,7%
414	Kota Dumai	3,3	53,6	11,0	68,7	156,6	3,3	43,9	11,0	68,7	3,9	8,2	158,9	1,5%
415	Kota Pekanbaru	18,3	118,4	31,1	87,7	255,5	18,3	105,2	31,1	87,7	8,7	18,3	269,4	5,4%
501	Kab. Batanghari	4,0	128,8	7,9	5,0	145,7	4,0	127,2	7,9	5,0	2,3	4,9	151,3	3,9%
502	Kab. Bungo	4,5	142,1	3,4	3,3	153,3	4,5	140,6	3,4	3,3	2,0	4,2	158,0	3,1%
503	Kab. Kerinci	6,1	177,9	3,5	2,9	190,5	6,1	171,0	3,5	2,9	3,6	7,6	194,7	2,2%
504	Kab. Merangin	4,4	148,6	6,6	3,3	162,9	4,4	147,0	6,6	3,3	2,4	5,1	168,8	3,6%
505	Kab. Muaro Jambi	4,3	112,5	8,1	5,8	130,8	4,3	112,4	8,1	5,8	2,3	4,9	137,9	5,4%
506	Kab. Sarolangun	3,7	118,7	5,4	3,7	131,5	3,7	118,6	5,4	3,7	2,1	4,3	137,7	4,8%

Bersambung...

## Desentralisasi Fiskal dan Mobilisasi Penerimaan Daerah Kabupaten/Kota:

## Lanjutan...

507	Kab. Tj. Jabung Barat	5.1	111.5	8.2	5.0	129.8	5.1	109.0	8.2	5.0	3.7	7.7	138.7	6.9%
508	Kab. Tj. Jabung Timur	4.9	115.0	5.0	8.7	133.6	4.9	110.5	5.0	8.7	4.4	9.3	142.7	6.8%
509	Kab. Tebo	3.8	115.8	4.2	3.9	127.7	3.8	116.7	4.2	3.9	2.0	4.2	134.8	5.5%
510	Kota Jambi	13.2	166.4	8.7	5.9	194.3	13.2	152.9	8.7	5.9	6.8	14.4	201.9	3.8%
601	Kab. Lahat	8.6	186.9	10.0	37.1	242.6	8.6	171.4	10.0	37.1	8.3	17.5	252.9	4.2%
602	Kab. M. Banyuasin	14.2	238.7	22.5	145.5	411.0	14.2	186.3	22.5	145.5	20.9	44.2	433.6	5.5%
603	Kab. M. Rawas	7.1	206.3	17.8	51.2	282.4	7.1	189.9	17.8	51.2	8.7	18.4	293.0	3.8%
604	Kab. Muara Enim	9.7	191.2	23.6	56.0	280.4	9.7	146.0	23.6	56.0	22.4	47.3	304.9	8.7%
605	Kab. OKI	10.2	253.0	10.6	34.6	308.4	10.2	239.1	10.6	34.6	9.9	21.0	325.4	5.5%
606	Kab. OKU	12.6	268.3	12.4	37.8	331.1	12.6	245.8	12.4	37.8	13.2	28.0	349.7	5.6%
607	Kota Palembang	44.2	299.8	26.6	33.1	403.8	44.2	239.9	26.6	33.1	28.4	60.1	432.3	7.1%
701	Kab. Bengkulu Selatan	5.0	178.8	7.0	1.6	192.4	5.0	176.2	7.0	1.6	2.2	4.6	196.5	2.2%
702	Kab. Bengkulu Utara	5.2	171.8	6.2	2.7	185.9	5.2	169.5	6.2	2.7	2.8	5.9	192.3	3.4%
703	Kab. Rejang Lebong	7.2	180.6	3.8	1.3	192.9	7.2	170.8	3.8	1.3	5.8	12.2	201.1	4.3%
704	Kota Bengkulu	10.4	151.8	3.3	1.3	166.9	10.4	143.1	3.3	1.3	3.9	8.2	170.2	2.0%
801	Kab. Lampung Barat	4.8	150.3	5.6	10.5	171.2	4.8	148.0	5.6	10.5	4.3	9.1	182.3	6.5%
802	Kab. Lampung Selatan	9.8	260.2	9.5	10.6	290.1	9.8	241.1	9.5	10.6	11.5	24.3	306.7	5.7%
803	Kab. Lampung Tengah	11.3	279.7	11.2	10.5	312.8	11.3	255.9	11.2	10.5	12.5	26.4	327.9	4.8%
804	Kab. Lampung Utara	5.6	192.5	4.8	10.5	213.3	5.6	185.6	4.8	10.5	3.6	7.7	217.8	2.1%
805	Kab. Lampung Timur	7.2	224.1	4.9	15.8	251.9	7.2	210.7	4.9	15.8	8.5	18.0	265.1	5.2%
806	Kab. Tanggamus	8.8	227.8	6.4	10.5	253.5	8.8	213.4	6.4	10.5	8.2	17.3	264.6	4.4%
807	Kab. T. Baung	5.4	184.7	7.3	10.5	207.9	5.4	181.2	7.3	10.5	6.3	13.3	224.0	7.7%
808	Kab. Way Kanan	3.4	126.9	3.9	10.5	144.8	3.4	126.6	3.9	10.5	1.9	4.0	150.3	3.8%
809	Kota B. Lampung	26.8	212.4	10.7	10.5	260.4	26.8	176.5	10.7	10.5	17.3	36.6	278.5	7.0%
810	Kota Metro	3.5	110.6	1.9	10.5	126.5	3.5	109.7	1.9	10.5	0.8	1.8	128.3	1.4%
1001	Kab. Bandung	51.6	700.1	46.5	5.6	803.9	51.6	574.8	46.5	5.6	67.0	141.7	887.3	10.4%

Bersambung...

Lanjutan...

1002	Kab. Bekasi	34,5	244,6	74,9	6,3	360,4	34,5	142,7	74,9	6,3	53,1	112,3	423,8	17,6%
1003	Kab. Bogor	41,2	453,3	56,5	7,6	558,5	41,2	383,1	56,5	7,6	42,7	90,2	621,2	11,2%
1004	Kab. Ciamis	24,4	376,9	6,9	5,5	413,9	24,4	340,1	6,9	5,5	19,0	40,1	436,1	5,4%
1005	Kab. Cianjur	23,7	344,8	16,9	5,5	390,9	23,7	314,9	16,9	5,5	18,7	39,5	419,1	7,2%
1006	Kab. Cirebon	19,7	335,7	12,8	5,3	373,5	19,7	315,1	12,8	5,3	14,6	30,9	398,3	6,6%
1007	Kab. Garut	25,8	413,1	10,2	5,3	454,5	25,8	376,9	10,2	5,3	20,6	43,5	482,4	6,1%
1008	Kab. Indramayu	20,0	294,7	14,4	13,4	342,4	20,0	207,4	14,4	13,4	47,0	99,4	401,5	17,3%
1009	Kab. Karawang	30,0	284,8	39,8	24,1	378,8	30,0	236,8	39,8	24,1	25,8	54,5	411,1	8,5%
1010	Kab. Kuningan	11,5	249,1	5,0	5,5	271,1	11,5	237,9	5,0	5,5	7,2	15,2	282,2	4,1%
1011	Kab. Majalengka	13,6	258,2	5,5	6,0	283,3	13,6	242,4	5,5	6,0	9,8	20,8	298,1	5,2%
1012	Kab. Purwakarta	11,4	178,0	16,2	5,3	210,9	11,4	165,8	16,2	5,3	7,5	15,9	222,1	5,3%
1013	Kab. Subang	17,7	263,2	13,2	10,0	304,2	17,7	239,0	13,2	10,0	14,3	30,3	324,5	6,7%
1014	Kab. Sukabumi	22,4	333,6	14,3	5,8	376,1	22,4	306,3	14,3	5,8	18,9	40,0	407,8	8,4%
1015	Kab. Sumedang	12,8	273,2	6,9	5,6	298,5	12,8	255,9	6,9	5,6	9,3	19,6	310,0	3,8%
1016	Kab. Tasikmalaya	26,5	478,0	10,9	5,4	520,9	26,5	441,8	10,9	5,4	18,2	38,4	541,3	3,9%
1017	Kota Bandung	82,9	393,1	107,6	5,3	588,8	82,9	297,8	107,6	5,3	51,5	108,8	653,9	11,0%
1018	Kota Bekasi	32,9	215,6	49,7	5,3	303,5	32,9	163,8	49,7	5,3	29,9	63,2	344,6	13,6%
1019	Kota Bogor	14,0	174,6	21,7	5,3	216,5	14,9	161,2	21,7	5,3	8,1	17,2	228,3	5,5%
1020	Kota Cirebon	19,4	137,5	8,6	5,3	170,8	19,4	112,1	8,6	5,3	12,8	27,2	185,3	8,5%
1021	Kota Depok	8,0	183,2	30,2	5,3	226,7	8,0	173,4	30,2	5,3	8,5	18,0	243,4	7,4%
1022	Kota Sukabumi	10,0	121,3	3,7	5,3	140,2	10,0	116,1	3,7	5,3	3,7	7,8	146,5	4,5%
1101	Kab. Banjarnegara	8,4	214,6	5,6	0,8	229,4	8,4	204,0	5,6	0,8	7,2	15,2	241,2	5,1%
1102	Kab. Banyumas	12,1	325,6	10,0	0,9	348,7	12,1	311,9	10,0	0,9	9,0	18,9	362,8	4,1%
1103	Kab. Batang	7,4	200,0	5,6	0,7	213,8	7,4	190,6	5,6	0,7	6,2	13,1	223,6	4,6%
1104	Kab. Blora	6,8	228,1	8,4	2,4	245,7	6,8	218,7	8,4	2,4	6,0	12,7	255,0	3,8%
1105	Kab. Boyolali	11,3	266,3	6,4	0,8	284,8	11,3	249,9	6,4	0,8	8,9	18,9	296,1	4,0%

Bersambung...

## Desentralisasi Fiskal dan Mobilisasi Penerimaan Daerah Kabupaten/Kota:

Lanjutan...

1106	Kab. Brebes	10,7	314,5	9,1	1,8	336,2	10,7	301,6	9,1	1,8	10,5	22,3	356,1	5,9%
1107	Kab. Cilacap	49,7	331,4	13,3	1,2	395,6	49,7	201,8	13,3	1,2	70,9	150,0	487,0	23,1%
1108	Kab. Demak	8,6	214,6	7,0	0,7	230,9	8,6	207,2	7,0	0,7	6,6	14,0	244,1	5,7%
1109	Kab. Grobogan	8,5	272,1	8,5	1,2	290,3	8,5	266,3	8,5	1,2	5,7	12,1	302,4	4,2%
1110	Kab. Jepara	12,4	226,8	6,7	0,7	246,6	12,4	211,9	6,7	0,7	9,4	20,0	261,1	5,9%
1111	Kab. Karanganyar	9,9	224,1	6,6	0,7	241,3	9,9	207,6	6,6	0,7	9,1	19,3	253,3	4,9%
1112	Kab. Kebumen	10,0	288,8	6,5	0,7	306,0	10,0	275,7	6,5	0,7	7,8	16,4	317,1	3,6%
1113	Kab. Kendal	12,3	233,5	8,3	0,9	255,0	12,3	208,5	8,3	0,9	13,6	28,7	272,4	6,8%
1114	Kab. Klaten	13,7	338,8	7,0	0,7	360,2	13,7	315,5	7,0	0,7	10,6	22,5	370,1	2,7%
1115	Kab. Kudus	25,7	185,1	6,8	0,8	218,4	25,7	129,6	6,8	0,8	28,9	61,1	253,0	15,8%
1116	Kab. Magelang	10,8	274,9	6,6	0,7	292,9	10,8	259,2	6,6	0,7	9,3	19,7	306,2	4,5%
1117	Kab. Pati	10,1	276,7	8,2	0,8	295,8	10,1	262,8	8,2	0,8	8,9	18,8	309,6	4,7%
1118	Kab. Pekalongan	10,8	202,4	5,3	0,8	219,2	10,8	189,8	5,3	0,8	8,4	17,8	232,8	6,2%
1119	Kab. Pemalang	9,7	262,1	7,1	1,4	280,3	9,7	251,9	7,1	1,4	8,2	17,3	295,6	5,5%
1120	Kab. Purbalangga	8,1	236,2	5,3	0,7	250,3	8,1	227,6	5,3	0,7	5,2	11,0	257,9	3,0%
1121	Kab. Purworejo	9,1	233,6	5,7	0,9	249,3	9,1	220,8	5,7	0,9	6,7	14,1	257,2	3,2%
1122	Kab. Rembang	6,7	175,2	5,6	1,1	188,7	6,7	168,5	5,6	1,1	4,8	10,1	196,8	4,3%
1123	Kab. Semarang	10,8	225,4	8,7	0,8	245,6	10,8	208,4	8,7	0,8	9,8	20,7	259,1	5,5%
1124	Kab. Sragen	7,8	250,0	6,3	0,7	264,8	7,8	238,5	6,3	0,7	6,5	13,7	273,4	3,3%
1125	Kab. Sukoharjo	10,8	227,3	7,6	0,7	246,5	10,8	211,0	7,6	0,7	8,9	18,8	257,8	4,6%
1126	Kab. Tegal	10,2	274,3	8,2	1,4	294,1	10,2	266,4	8,2	1,4	7,3	15,5	309,0	5,0%
1127	Kab. Temanggung	7,8	202,9	5,3	0,7	216,7	7,8	193,8	5,3	0,7	5,8	12,3	225,8	4,2%
1128	Kab. Wonogiri	7,7	255,6	5,6	0,7	269,7	7,7	244,1	5,6	0,7	7,4	15,5	281,1	4,2%
1129	Kab. Wonosobo	5,7	216,7	5,5	0,9	238,9	5,7	210,4	5,5	0,9	4,6	9,7	236,8	3,5%
1130	Kota Magelang	7,2	107,1	3,5	0,7	118,4	7,2	103,0	3,5	0,7	2,6	5,6	122,6	3,5%
1131	Kota Pekalongan	7,9	107,2	4,2	0,7	120,0	7,9	101,3	4,2	0,7	4,4	9,2	127,7	6,4%

Bersambung...

## Lanjutan...

1132	Kota Salatiga	5,6	106,9	3,8	0,7	117,0	5,6	105,2	3,8	0,7	2,0	4,2	121,5	3,9%
1133	Kota Semarang	73,4	271,6	42,8	0,7	388,6	73,4	191,1	42,8	0,7	44,1	93,3	445,4	14,6%
1134	Kota Surakarta	16,4	188,3	11,9	0,7	217,4	16,4	167,2	11,9	0,7	10,0	21,2	227,5	4,7%
1135	Kota Tegal	6,2	113,0	5,0	0,7	125,0	6,2	109,1	5,0	0,7	2,8	5,8	129,8	3,8%
1201	Kab. Bantul	10,6	287,8	7,1	0,5	305,9	10,6	269,4	7,1	0,5	7,9	16,7	312,1	2,0%
1202	Kab. G. Kidul	9,5	228,4	4,3	0,5	242,7	9,5	215,1	4,3	0,5	7,4	15,6	252,4	4,0%
1203	Kab. Kulon Progo	6,3	199,3	3,8	0,5	209,9	6,3	190,4	3,8	0,5	4,1	8,7	213,8	1,8%
1204	Kab. Sleman	19,7	270,8	15,2	0,5	306,2	19,7	244,4	15,2	0,5	12,5	26,4	318,8	4,1%
1205	Kota Yogyakarta	24,4	175,5	15,0	0,5	215,5	24,4	150,3	15,0	0,5	11,3	23,9	225,5	4,6%
1301	Kab. Bangkalan	9,8	205,4	5,8	1,8	222,8	9,8	196,8	5,8	1,8	6,6	13,9	234,7	5,3%
1302	Kab. Banyuwangi	15,5	324,6	12,5	2,3	354,9	15,5	297,2	12,5	2,3	16,1	34,0	377,6	6,4%
1303	Kab. Blitar	11,8	285,0	7,5	1,8	306,0	11,8	268,8	7,5	1,8	8,9	18,8	317,7	3,8%
1304	Kab. Bojonegoro	9,9	262,6	10,0	4,4	286,9	9,9	251,9	10,0	4,4	7,6	16,1	299,8	4,5%
1305	Kab. Bondowoso	6,5	207,1	5,1	1,8	220,5	6,5	199,9	5,1	1,8	5,0	10,6	228,9	3,8%
1306	Kab. Gresik	28,6	210,9	24,2	1,8	265,4	28,6	149,5	24,2	1,8	32,2	68,0	304,2	14,6%
1307	Kab. Jember	19,6	423,8	16,7	2,3	462,3	19,6	393,5	16,7	2,3	18,0	38,0	486,1	5,6%
1308	Kab. Jombang	14,8	260,1	9,7	1,8	286,5	14,8	241,9	9,7	1,8	11,1	23,5	302,8	5,7%
1309	Kab. Kediri	13,6	314,2	12,7	2,1	342,6	13,6	295,8	12,7	2,1	11,1	23,5	358,7	4,7%
1310	Kab. Lamongan	11,5	268,9	8,9	1,7	290,9	11,5	253,2	8,9	1,7	10,1	21,4	306,8	5,5%
1311	Kab. Lumajang	11,0	234,9	7,8	1,9	255,5	11,0	220,0	7,8	1,9	9,4	20,0	270,0	5,7%
1312	Kab. Madiun	8,2	218,3	6,1	2,0	234,6	8,2	208,4	6,1	2,0	5,6	11,7	242,0	3,2%
1313	Kab. Magetan	8,2	221,1	6,0	1,7	236,9	8,2	209,5	6,0	1,7	5,8	12,3	243,6	2,8%
1314	Kab. Malang	31,0	454,3	17,9	1,8	505,1	31,0	409,0	17,9	1,8	25,6	54,0	539,4	6,8%
1315	Kab. Mojokerto	11,1	238,8	12,4	1,7	264,0	11,1	223,1	12,4	1,7	8,8	18,6	275,7	4,4%
1316	Kab. Nganjuk	12,5	267,9	8,4	1,9	290,7	12,5	251,1	8,4	1,9	9,1	19,2	302,2	3,9%
1317	Kab. Ngawi	8,4	235,0	7,5	2,2	253,0	8,4	225,3	7,5	2,2	5,9	12,6	261,9	3,5%

Bersambung...

## Desentralisasi Fiskal dan Mobilisasi Penerimaan Daerah Kabupaten/Kota:

## Lanjutan...

1318	Kab. Pacitan	5,3	185,0	4,1	1,7	198,9	5,3	184,6	4,1	1,7	2,9	6,2	204,7	2,9%
1319	Kab. Pamekasan	5,3	203,7	6,0	1,6	216,6	5,3	199,1	6,0	1,6	4,0	8,4	224,4	3,6%
1320	Kab. Pasuruan	11,5	310,4	18,8	1,8	342,5	11,5	288,9	18,8	1,8	12,1	25,5	358,6	4,7%
1321	Kab. Ponorogo	9,5	246,7	5,9	1,9	264,0	9,5	236,7	5,9	1,9	6,2	13,1	273,3	3,5%
1322	Kab. Probolinggo	12,6	256,5	12,3	2,0	283,4	12,6	233,4	12,3	2,0	12,7	26,9	300,0	5,9%
1323	Kab. Sampang	5,7	178,8	5,8	1,6	192,0	5,7	177,8	5,8	1,6	3,6	7,7	202,3	5,4%
1324	Kab. Sidoarjo	34,5	281,9	42,3	2,4	361,1	34,5	209,5	42,3	2,4	37,7	79,6	406,0	12,4%
1325	Kab. Situbondo	9,9	182,4	5,9	1,8	199,9	9,9	172,8	5,9	1,8	6,4	13,5	210,3	5,2%
1326	Kab. Sumenep	9,3	237,3	13,2	30,2	289,9	9,3	220,7	13,2	30,2	9,0	19,0	301,3	3,9%
1327	Kab. Trenggalek	6,8	228,2	5,0	1,7	241,7	6,8	222,6	5,0	1,7	3,6	7,5	247,2	2,3%
1328	Kab. Tuban	10,8	242,8	9,8	2,1	265,4	10,8	226,5	9,8	2,1	10,5	22,1	281,7	6,1%
1329	Kab. Tulungagung	15,2	269,3	8,0	1,7	294,1	15,2	246,6	8,0	1,7	11,6	24,4	307,4	4,5%
1330	Kota Blitar	4,5	103,2	3,5	1,6	112,7	4,5	102,9	3,5	1,6	1,2	2,6	116,3	3,2%
1331	Kota Kediri	24,2	113,4	10,3	1,6	149,6	24,2	73,3	10,3	1,6	44,6	94,2	248,2	65,9%
1332	Kota Madiun	5,6	113,7	5,8	1,6	126,7	5,6	110,8	5,8	1,6	2,4	5,1	131,3	3,6%
1333	Kota Malang	52,5	183,7	19,4	1,6	257,2	52,5	124,5	19,4	1,6	30,5	64,5	293,0	13,9%
1334	Kota Mojokerto	4,7	96,8	4,3	1,6	107,4	4,7	96,5	4,3	1,6	1,3	2,7	111,0	3,3%
1335	Kota Pasuruan	6,8	105,7	3,7	1,6	117,8	6,8	102,9	3,7	1,6	2,8	5,8	123,5	4,9%
1336	Kota Probolinggo	7,7	102,3	4,4	1,6	116,1	7,7	97,5	4,4	1,6	3,9	8,2	123,3	6,2%
1337	Kota Surabaya	183,4	278,3	164,3	1,6	627,7	183,4	241,2	164,3	1,6	130,2	275,2	995,9	58,7%

dst. -s/d- Kota Gorontalo

Catatan: Perhitungan dilakukan untuk Kabupaten Aceh Barat -s/d- Kota Gorontalo, namun mengingat keterbatasan tempat, maka lampiran tulisan ini hanya memuat hasil simulasi untuk daerah Kabupaten Aceh Barat -s/d- Kota Surabaya.  
(Hasil selengkapnya ada pada penulis).